



PEMERINTAH
KABUPATEN SIDOARJO

RENCANA STRATEGI DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016-2021



Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017

**PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS)**

Hal | i

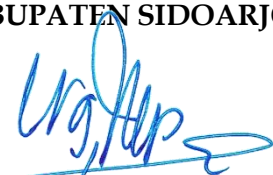
Kata Pengantar

Segala puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, pada akhirnya Penyusunan *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016- 2021* dapat terselesaikan. Secara umum, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo merupakan dokumen yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan secara lebih spesifik, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memuat isu strategis, khususnya dalam pembangunan bidang sosial di Kabupaten Sidoarjo. Melalui dokumen Renstra ini, maka Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dapat memperoleh pedoman dalam menentukan arah atau strategi dan sasaran strategi yang ingin dicapai selama periode tahun 2016-2021.

Ucapan terima kasih tidak lupa kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dan telah banyak memberikan sumbangan pemikiran, data-data maupun informasi yang berkaitan dengan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo ini.

Renstra Dinas Sosial telah direview pada tanggal Satu Bulan Februari Tahun 2021, dikarenakan terdapat perubahan nomenklatur pada matriks renstra, semula mengacu pada Permendagri nomor 13 tahun 2006, mulai tahun 2021 mengacu pada permendagri nomor 90 tahun 2019 dan dimutakhirkan dengan Surat Bina Keuda Kemendagri tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 050/4189/Keuda.

Sidoarjo, 01 Februari 2021
**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDOARJO**



Dr. TIRTO ADI, M.Pd

Pembina Tk. I

NIP. 19660511 199802 1 003

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Grafik	vi
Daftar Gambar	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.3.1 Maksud.....	6
1.3.2 Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO.....	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	8
2.1.1 Kepala Dinas.....	8
2.1.2 Sekretaris	9
2.1.3 Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin....	10
2.1.4 Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial.....	12
2.1.5 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.....	14
2.1.6 Unit Pelaksana Teknis Liponsos.....	15
2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional	16
2.2 Sumberdaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	17
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	21
2.3.1 Persentase Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).....	22
2.3.2 Persentase Jumlah Penanganan PMKS.....	23
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	26
2.4.1 Tantangan	26
2.4.2 Peluang.....	27
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	28
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.....	28
3.2 Telaah Visi, Misi, serta Program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Terpilih	30
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	31
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	33

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	35
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	35
4.1.1 Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	35
4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	36
4.2 Strategi dan Kebijakan	37
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	43
BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	53
BAB VII PENUTUP.....	55

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Proporsi Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Jabatan	17
Tabel 2.2	Proporsi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Kepangkatan	18
Tabel 2.3	Proporsi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Pendidikan	19
Tabel 2.4	Proporsi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Usia	19
Tabel 2.5	Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 .	21
Tabel 2.6	Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.....	25
Tabel 2.7	Capaian Indikator SPM Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015	25
Tabel 3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	30
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Terhadap Pencapaian Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	31
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	32
Tabel 3.4	Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis.....	34
Tabel 3.5	Nilai Skor Kriteria Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.....	34
Tabel 4.1	Kesesuaian Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial.....	36
Tabel 4.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.....	37
Tabel 4.3	Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.....	38
Tabel 4.4	Analisis SWOT Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	38
Tabel 4.5	Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.....	40
Tabel 4.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.....	41
Tabel 4.7	Pohon Kinerja Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	42
Tabel 5.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.....	46
Tabel 6.1	Linearitas Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021	53
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Dinas Sosial Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021	54

Daftar Grafik

Grafik 2.1	Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Jabatan	17
Grafik 2.2	Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Kepangkatan.....	18
Grafik 2.3	Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Pendidikan	19
Grafik 2.4	Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Usia	20
Grafik 2.5	Perkembangan Jumlah PMKS di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016.....	23
Grafik 2.6	Perkembangan Penanganan PMKS di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016.....	24

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan di Daerah	2
Gambar 3.1 Linearitas Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.....	33
Gambar 4.1 Keterkaitan Strategi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Dengan Renstra Dinas Sosial.....	39
Gambar 4.2 Keterkaitan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Dengan Kebijakan Dinas Sosial	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial di masa mendatang masih dihadapkan pada berbagai tantangan dan permasalahan. Hal tersebut merupakan dampak sosial yang tidak diharapkan dari proses globalisasi, perluasan arus informasi dan industrialisasi. Tantang dan permasalahan tersebut tampil dalam bentuk melebarnya permasalahan sosial, melebarnya kesenjangan sosial, keterlantaran dan kemiskinan. Seiring dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya tuntutan masyarakat akan kemanfaatan pelayanan sosial (*sosial service*), maka pembangunan kesejahteraan sosial dituntut untuk dapat meningkatkan profesionalisme.

Sebagai salah satu penyangga ibu kota Jawa Timur, Kabupaten Sidoarjo juga menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial. Tercatat pada tahun 2015 jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) sebanyak 42.286 jiwa. Jumlah tersebut meningkat 4,82% jika dibandingkan tahun 2014 sebesar 40.342 jiwa. Peningkatan tersebut dikarenakan beberapa hal antara lain : (i) Peningkatan orang terlantar yang berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo; dan (ii) Meningkatnya fakir miskin yang diakibatkan berkurangnya area persawahan sehingga banyak para buruh tani yang kehilangan pekerjaan.

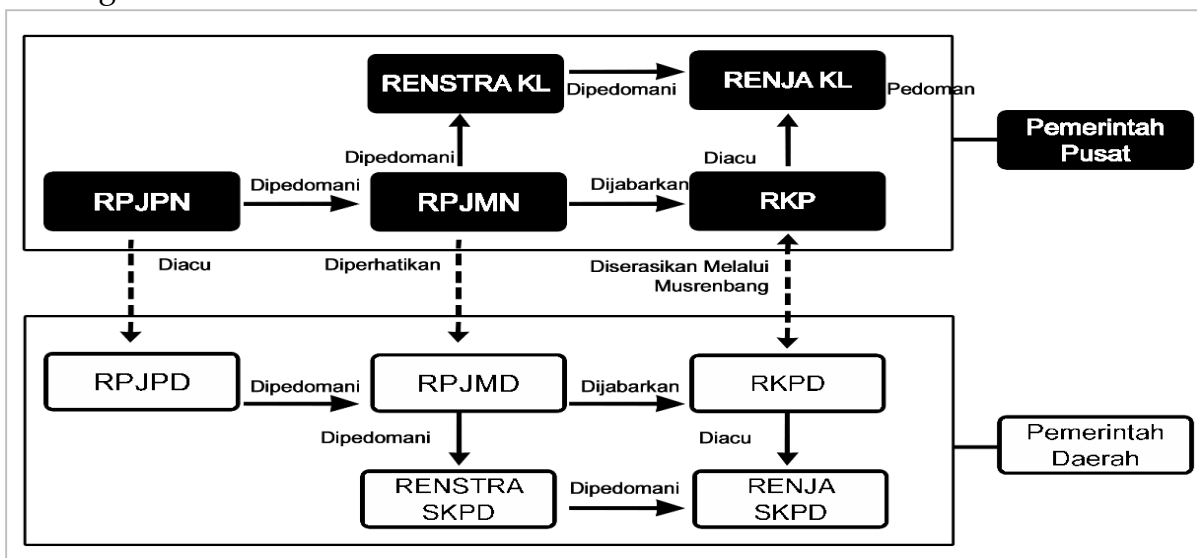
Sejalan dengan arus dan proses demokratisasi, keterbukaan, debirokratisasi, desentralisasi, serta otonomi daerah maka Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan diserahkan kepada perangkat Pemerintah Daerah dan masyarakat. Pada saat yang bersamaan perangkat Pemerintah Daerah dan masyarakat perlu diberi kepercayaan, peluang, pemberdayaan, dan peningkatan kemampuan. Memperhatikan tantangan dan permasalahan di masa mendatang, maka Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo harus memiliki rencana strategi yang mampu membawa pada kemandirian.

Kebutuhan tersebut tentu tidak dapat ditunda, mengingat prediksi ke depan mengenai kesejahteraan sosial belum dapat diformulasikan secara mantap. Para

pengelola lembaga kesejahteraan sosial juga harus dapat berkreasi menciptakan inovasi-inovasi baru yang mampu mendukung eksistensi suatu lembaga maupun kelangsungan pembangunan bidang kesejahteraan sosial. Memasuki era reformasi ternyata masih terdapat sejumlah warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, korban bencana, korban tindak kekerasan dan masalah sosial lainnya yang belum sepenuhnya terjangkau oleh proses pembinaan dan pelayanan sosial.

Dalam upaya menjawab berbagai permasalahan dan tantang di atas, maka dibutuhkan suatu perencanaan sebagai langkah strategis bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Perencanaan tersebut diharapkan dapat mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial yang diinginkan. Dengan demikian perlu dilakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang lebih dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Dalam penyusunan Renstra harus tetap berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam rangka memberikan pedoman yang jelas untuk dapat mencapai tujuan pembangunan jangka menengah.



Gambar 1.1
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan di Daerah

Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah. Perencanaan strategis juga akan menentukan arah suatu organisasi untuk tahun depan dan tahun-tahun selanjutnya. Termasuk didalamnya memuat cara mengarahkan dan mengevaluasi keberhasilan maupun ketidak berhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis umumnya mencakup keseluruhan organisasi. Adapun cakupan dari perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyandang Cacat;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Membagi Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 227 Tahun 1963 tentang Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 1963 tentang Tata Cara Penetapan Pahlawan Kemerdekaan Nasional;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban Penyelenggaraan Undian;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1983 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Gelandangan dan Pengemis;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 tentang Hari Anak Nasional;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
25. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil;
26. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi,
27. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan;

28. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;
29. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak;
30. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan Anak;
31. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS;
33. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019;
34. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 129/huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
36. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
37. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 17 Juli 1999 Nomor : 188.5/7728/041/1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
38. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021;
39. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
40. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.
41. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
42. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP 18 Tahun 2016
43. Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

44. Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

45. Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 ini adalah sebagai pedoman dalam menentukan arah tujuan organisasi sesuai dengan sasaran yang diprioritaskan melalui kebijakan, program dan kegiatan pokok sehingga seluruh komponen yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam organisasi dapat memahami secara utuh arah dan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, Renstra juga sebagai kendali dalam menentukan kebijakan dan program prioritas sehingga pelaksanaan penyelenggara tugas-tugas dapat berjalan secara baik.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin konsistensi pembangunan Dinas Sosial dengan dokumen perencanaan lainnya;
2. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Sosial dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sekaligus indikator capaian yang harus dipenuhi;
3. Menjamin komitmen seluruh pelaksana untuk berperan sesuai dengan kewenangan;
4. Sebagai pedoman pelaksanaan program pembangunan Dinas Sosial dalam mewujudkan pembangunan yang sinergis dengan pembangunan Kabupaten Sidoarjo;
5. Melaksanakan komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif, mulai dari penyusunan, implementasi dan pertanggungjawaban.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan penyajian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

- 2.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
- 2.2 Sumber Daya SKPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian terkait
- 3.4 Telaahan Renstra SKPD Provinsi
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
- 4.2 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN

DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

DINAS SOSIAL KABUPATEN SIDOARJO

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Sebelum dibentuk Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Urusan Sosial masih menjadi salah satu unsur pelaksana teknis daerah di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan ketenagakerjaan.

Tetapi setelah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Urusan sosial ditangani oleh Dinas Sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo memiliki fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sosial;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

2.1.1 Kepala Dinas

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas memimpin, koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Dinas Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan, rencana strategis dan rencana kerja bidang sosial serta kesekretariatan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;

- d. Pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas sosial
- g. Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang sosial yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka sekretaris memiliki fungsi yaitu :

- a. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan pelaporan;
- b. Pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

❖ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. Melaksanakan pengelolaan barang;
- c. Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. Melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

❖ Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- b. Menyusun laporan kinerja dinas;
- c. Menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- d. Melaksanakan administrasi keuangan
- e. Melaksanakan laporan pengelolaan keuangan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

2.1.3 *Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin*

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin memiliki fungsi yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

❖ *Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyalur Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan*

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyalur Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemberdayaan masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan ;
 1. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 2. Pelaksanaan pembinaan dan pendayagunaan karang taruna, organisasi sosial, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dunia usaha, pekerja sosial masyarakat dan wanita pemimpin kegiatan sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
 3. Pelaksanaan pemantauan, perizinan, penyelidikan dan penyidikan terhadap penyimpangan pengumpulan/ pengelolaan sumber dana sosial;
 4. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan;

5. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan.
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan dan penataan lingkungan;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ ***Seksi Kelembagaan Sosial Masyarakat, Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial***

Kepala Seksi Kelembagaan Sosial Masyarakat, Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kelembagaan sosial masyarakat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis kelembagaan sosial masyarakat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 1. Pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi penggalan potensi, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
 2. Pengelolaan taman makam pahlawan nasional Kabupaten/Kota;
 3. Pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 4. Koordinasi kegiatan pelestarian dan penanaman nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial pada generasi muda /pelajar / mahasiswa, guru/masyarakat, pemberian penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan dan janda perintis kemerdekaan, penganugerahan gelar tanda jasa dan tanda kehormatan dan restorasi sosial.
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis kelembagaan sosial masyarakat, kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ ***Seksi Penanganan Fakir Miskin***

Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan fakir miskin;

- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penanganan fakir miskin;
 - 1. Pelaksanaan verifikasi dan validasi data fakir miskin cakupan kabupaten;
 - 2. Pelaksanaan kebijakan penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, wanita rawan sosial ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil;
 - 3. Bimbingan dan latihan keterampilan usaha dalam rangka penanganan fakir miskin meliputi kegiatan pemberdayaan, pendampingan serta fasilitasi kebutuhan sosial ekonomi fakir miskin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi, keluarga rentan dan komunitas terpencil.
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penanganan fakir miskin;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.4 Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

❖ Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 1. Pelaksanaan bimbingan teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak , balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan

- perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, aksesibilitas sosial lanjut usia dan pengangkatan anak;
2. Pelaksanaan pelayanan rehabilitasi sosial anak, , balita, anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak yang membutuhkan perlindungan khusus, pelayanan dan perlindungan sosial lanjut usia, aksesibilitas sosial lanjut usia dan pengangkatan anak.
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ ***Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat***

Kepala Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat meliputi disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual, disabilitas ganda dan orang dengan gangguan jiwa, bekas penyakit kronis;
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat;
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ ***Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial***

Kepala Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial, meliputi: gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, korban perdagangan orang, korban tindak kekerasan dan eks. tuna susila;

- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial tuna sosial;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.5 Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang perlindungan dan jaminan sosial. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki fungsi yaitu :

- a. Penyusunan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Pelaporan pelaksanaan kegiatan perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

❖ Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial

Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
 - 1. Kegiatan kesiapsiagaan dan mitigasi, tanggap darurat bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial korban bencana alam, kerjasama dan pengelolaan logistik bencana korban bencana alam dan sosial;
 - 2. Kegiatan pencegahan, penanganan dan perlindungan bagi korban bencana sosial warga negara bermasalah dan pemulangan orang terlantar;
 - 3. Identifikasi, assesment serta penjangkauan cepat dalam rangka penyelenggaraan pencegahan, penanganan, perlindungan sosial dan intervensi psikososial.
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

❖ *Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial*

Kepala Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
 1. Penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi serta pengelolaan data untuk penguatan Program Keluarga Harapan;
 2. Bimbingan teknis penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental yang derajat kedisabilitasnya tergolong berat serta eks penderita penyakit kronis yang tergolong berat yang mengalami ketidakmampuan sosial dan ekonomi serta pengelolaan data untuk penguatan Program Keluarga Harapan.
- c. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2.1.6 Unit Pelaksana Teknis Liponsos

Unit Pelaksana Teknis Liponsos adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

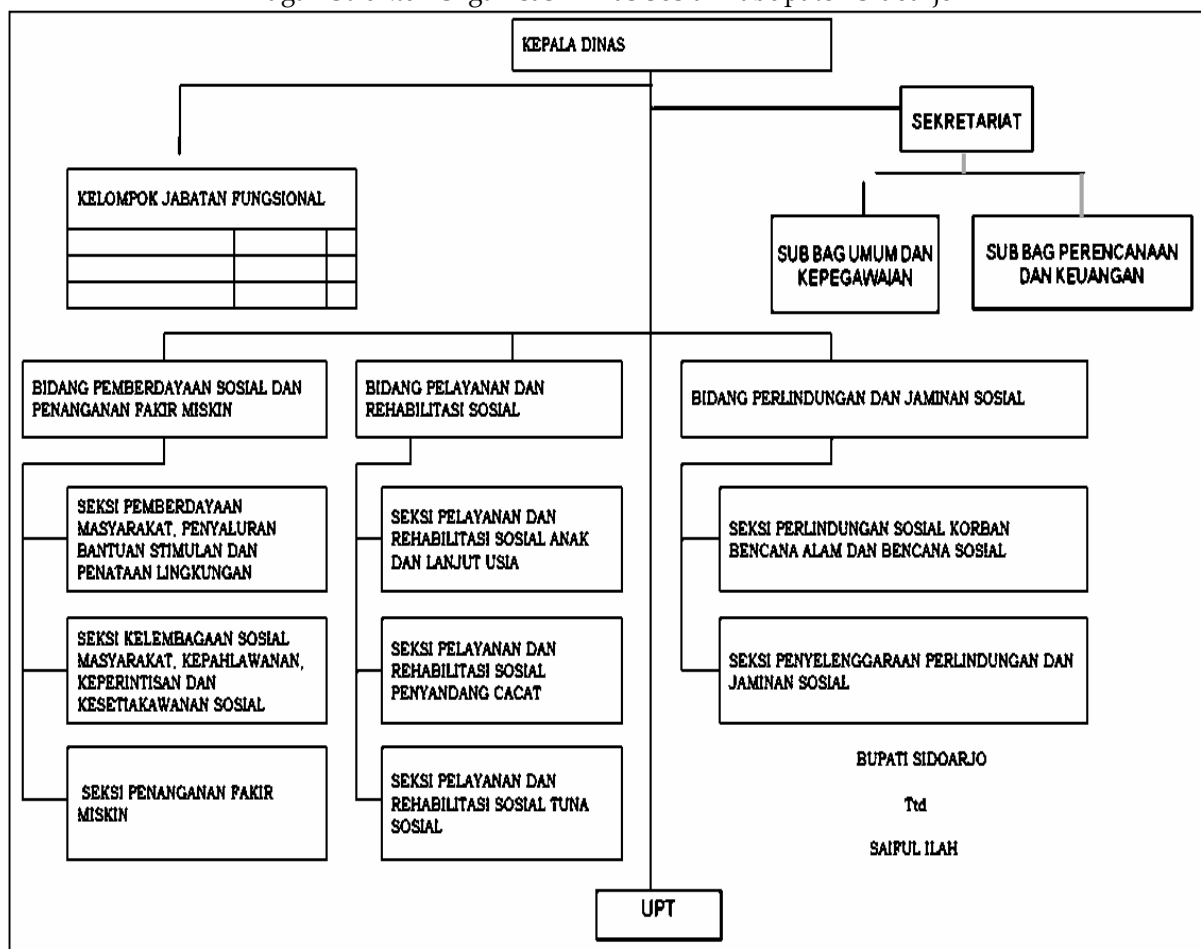
2.1.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial sesuai dengan keahlian. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari

sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan pada kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 73 Tahun 2016

2.2 Sumberdaya Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Sumber daya manusia (SDM) merupakan tenaga yang tersedia untuk menyokong dan melaksanakan tugas-tugas SKPD yang termuat dalam tupoksi demi mewujudkan visi dan misi SKPD. Kualitas dan kuantitas SDM merupakan faktor penentu keberhasilan pencapaian target kinerja SKPD yang sudah ditentukan. Oleh

sebab itu SDM dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dengan hasil yang optimal.

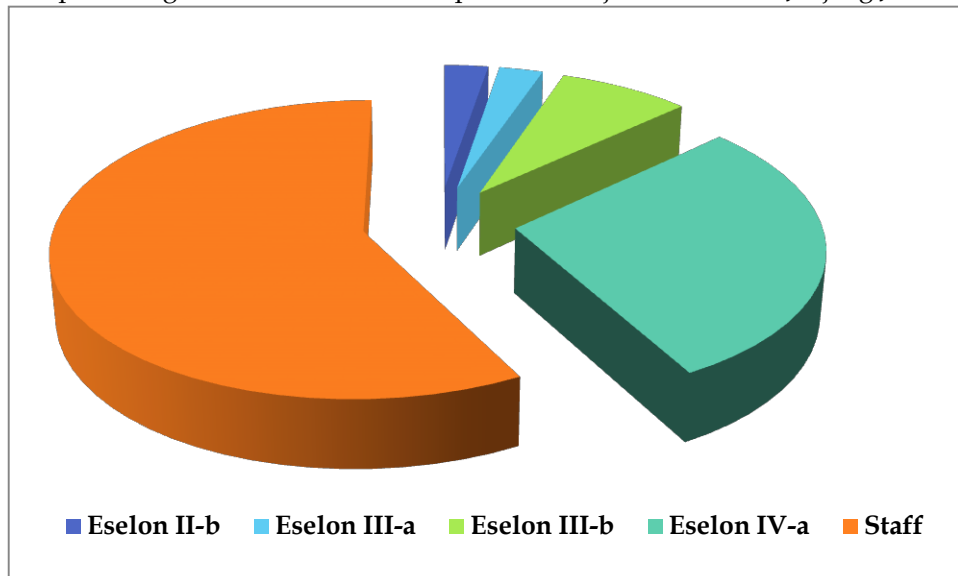
Jumlah pegawai yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo selaku pelaksana urusan wajib bidang sosial per 3 Januari 2017 berjumlah 38 orang. Apabila dari keseluruhan jumlah SDM tersebut diklasifikasikan berdasarkan jenjang jabatannya, maka akan diperoleh data sesuai tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 2.1
Proporsi Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Jabatan

No	Jenjang Jabatan	Jumlah
1	Eselon II-b	1 orang
2	Eselon III-a	1 orang
3	Eselon III-b	3 orang
4	Eselon IV-a	11 orang
5	Staff	22 orang
Jumlah		38 orang

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Jabatan



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Memperhatikan tabel 2.1 di atas, terlihat bahwa proporsi SDM di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sudah ideal. Jumlah staff sebanyak 22 apabila dibagi dengan jumlah eselon IV, setiap eselon IV memiliki dua orang staff untuk membantuk pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan tupoksinya.

Berdasarkan jenjang kepangkatan, SDM Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagian besar berada pada jenjang penata sebanyak 63,16%. Dari jumlah tersebut, tercatat 31,58% SDM Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berada pada jenjang Penata

Tk. I (III/d). Lebih detail komposisi pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berdasarkan jenjang kepangkatan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.2

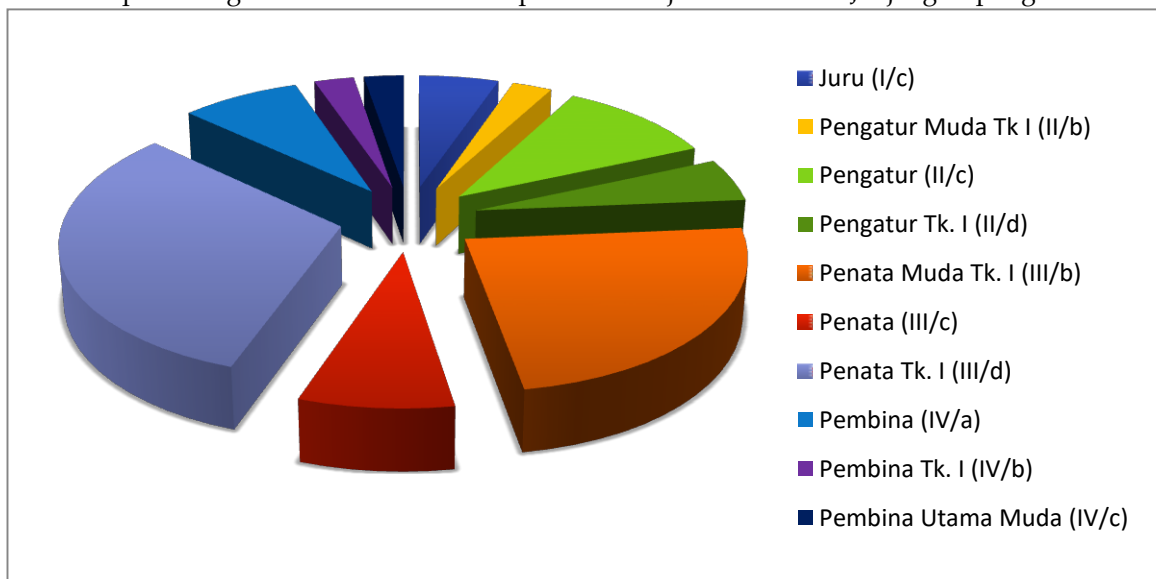
Proporsi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

No	Jenjang Kepangkatan	Jumlah (Orang)
1	Juru (I/c)	2
2	Pengatur Muda Tk I (II/b)	1
3	Pengatur (II/c)	4
4	Pengatur Tk. I (II/d)	2
5	Penata Muda Tk. I (III/b)	9
6	Penata (III/c)	3
7	Penata Tk. I (III/d)	12
8	Pembina (IV/a)	3
9	Pembina Tk. I (IV/b)	1
10	Pembina Utama Muda (IV/c)	1
Jumlah		38

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2.2

Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Kepangkatan



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

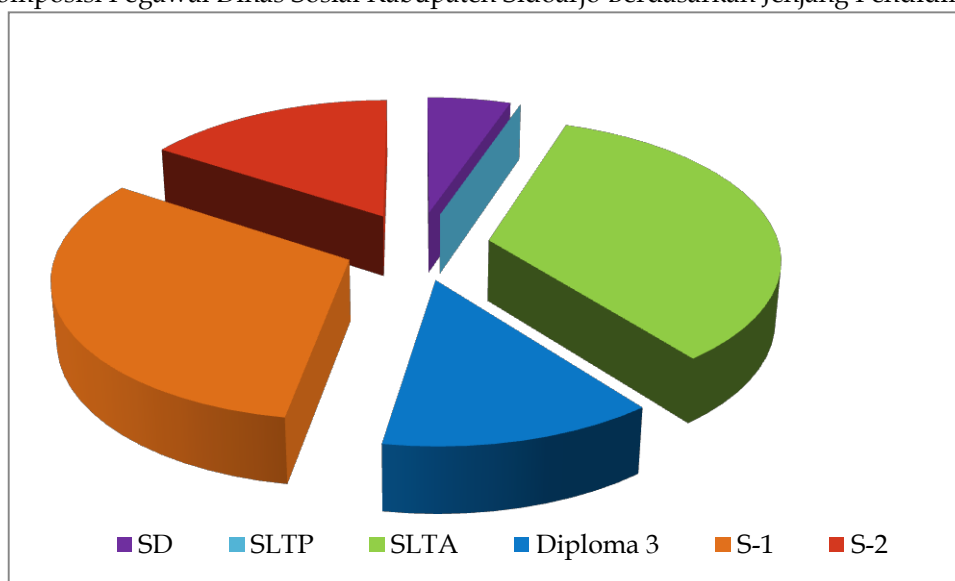
Jumlah SDM Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berdasarkan tingkat pendidikan terlihat sudah cukup baik. Sebagian besar pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sudah menyelesaikan pendidikan tinggi, pada jenjang diploma (D-3) ke atas. Berdasarkan catatan yang ada sebanyak 6 orang pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo bahkan telah menyelesaikan program magister. Lebih detail mengenai komposisi SDM berdasarkan jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 2.3
Proporsi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	SD	2
2	SLTP	0
3	SLTA	13
4	Diploma 3	5
5	S-1	12
6	S-2	6
Jumlah		38

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2.3
Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Dilihat berdasarkan jenjang usia, maka SDM Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sebagian besar berada pada usia 51-60 tahun. Tercatat sebanyak 25 orang (65,79%) pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berada pada rentang usia tersebut. Lebih detail komposisi pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berdasarkan jenjang usia dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

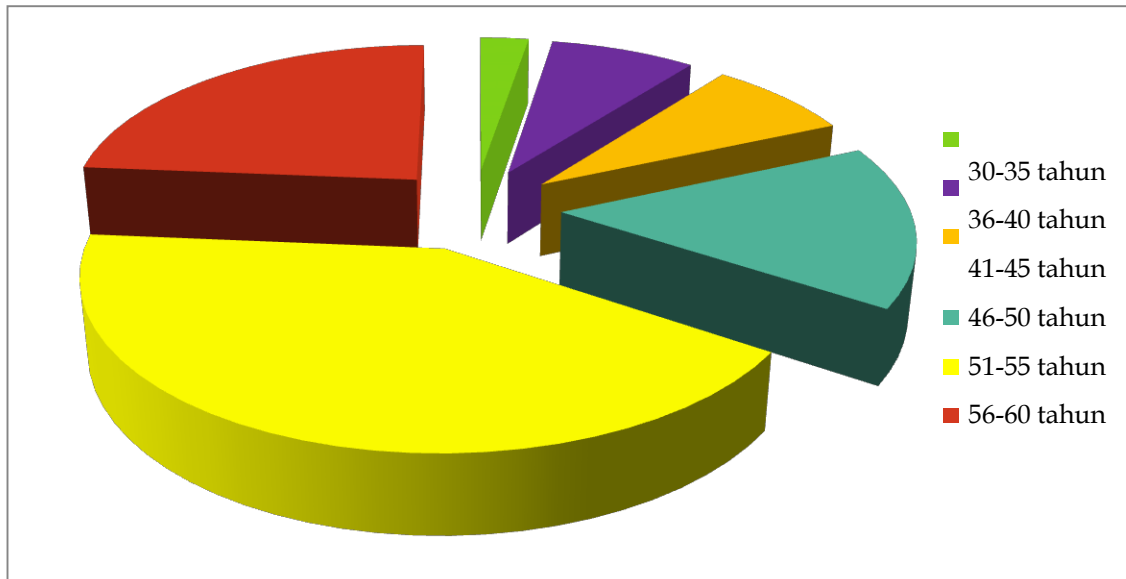
Tabel 2.4
Proporsi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Usia

No	Jenjang Usia	Jumlah (Orang)
1	30-35 tahun	1
2	36-40 tahun	3
3	41-45 tahun	3
4	46-50 tahun	6
5	51-55 tahun	16
6	56-60 tahun	9
Jumlah		38

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Grafik 2.4

Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Jenjang Usia



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Memperhatikan jumlah SDM yang cukup banyak dengan komposisi yang cukup beragam, maka seluruh pegawai diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas sehari-hari. Dengan demikian diharapkan beban pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam upaya mempermudah pelaksanaan tugas sehari-hari serta dapat menyelesaikan tugas dengan baik dan benar, maka diperlukan sarana dan prasarana pendukung guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit organisasi. Hal ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas. Dengan demikian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya dapat terselesaikan dengan tepat, cepat dan akurat. Adapun sarana dan prasarana yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo per 3 Januari 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017

No	Nama/Jenis Barang	Satuan	Jumlah Barang	Kondisi
1	Bangunan Kantor	Unit	2	Baik
2	Meja Kerja	Buah	33	Baik
3	Meja Resepsionis	Buah	1	Baik
4	Meja Rapat	Buah	8	Baik
5	Kursi Rapat	Buah	247	Baik
6	Kursi Biasa	Buah	20	Baik
7	Kursi Kerja	Buah	42	Baik
8	Filling Kabinet Besi	Buah	2	Baik
9	Filling Kayu	Buah	1	Baik
10	Lemari Besi	Buah	1	Baik
11	Brankas	Buah	1	Baik
12	Lemari	Buah	6	Baik
13	Lemari Kayu	Buah	6	Baik
14	Lemari Kaca	Buah	12	Baik
15	AC	Buah	27	Baik
16	Televisi	Buah	4	Baik
17	Printer	Buah	12	Baik
18	Komputer	Unit	7	Baik
19	Tabung Pemadam Kebakaran	Buah	10	Baik
20	Laptop	Buah	11	Baik
21	Scanner	Buah	1	Baik
22	Mesin Penghancur Kertas	Buah	1	Baik
23	Tangga Lipat Alumnum	Buah	1	Baik
24	Mesin Pemotong Kayu	Buah	2	Baik
25	Kamera Digital	Buah	3	Baik
26	Infocus	Buah	1	Baik
27	Sound System	Buah	2	Baik
28	CCTV	Set	1	Baik
29	Pick Up	Buah	1	Baik
30	Mobil/Station Wagon	Buah	8	Baik
31	Sepeda Motor	Buah	7	Baik

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan tabel 2.5 di atas, terlihat bahwa semua sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo semua dalam kondisi baik. Diharapkan dengan kondisi sarana prasarana tersebut kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dapat berjalan dengan efektif.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Kinerja pelayanan SKPD merupakan suatu sarana yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan perencanaan suatu program/kegiatan, memonitoring hasil pelaksanaan suatu program/kegiatan, serta mengevaluasi dampak yang terjadi pada target program/kegiatan apakah sudah sesuai dengan luaran yang diharapkan. Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk

urusan wajib, dan/ atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/ atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

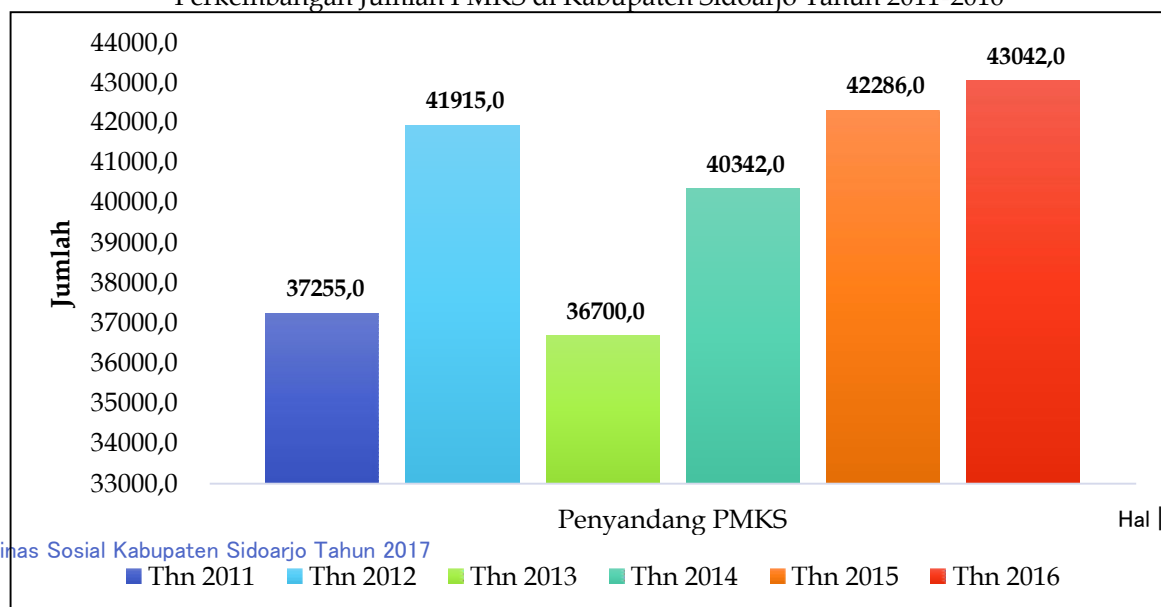
2.3.1 Persentase Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk tahun 2016 sebanyak 43.042 orang, meningkat 22% dari pada realisasi tahun 2015 yang sebanyak 42.286 orang, sedangkan target RPJMD tahun 2016 jumlah PMKS yang berhasil tertangani sejumlah 28.756 jiwa. Peningkatan jumlah PMKS pada tahun 2016 disebabkan oleh :

1. Dampak urbanisasi;
2. Peningkatan orang terlantar yang berasal dari luar Kabupaten Sidoarjo;
3. Meningkatnya fakir miskin yang diakibatkan berkurangnya area persawahan sehingga banyak para buruh tani yang kehilangan pekerjaan;
4. Dampak PHK oleh perusahaan.

Namun demikian peningkatan PMKS di Kabupaten Sidoarjo telah direspon oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan meningkatkan penanganan PMKS. Peran yang diambil pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya pengentasan PMKS ini lebih banyak pada fungsi koordinasi dan distribusi sumber daya, mengingat masalah kesejahteraan sosial merupakan masalah yang rumit karena begitu banyaknya faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengentaskan komunitas masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program-program pemberdayaan dan bantuan modal untuk usaha ekonomi. Perkembangan jumlah PMKS dari tahun 2011-2016 dapat dilihat dari grafik dibawah ini :

Grafik 2.5
Perkembangan Jumlah PMKS di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011-2016



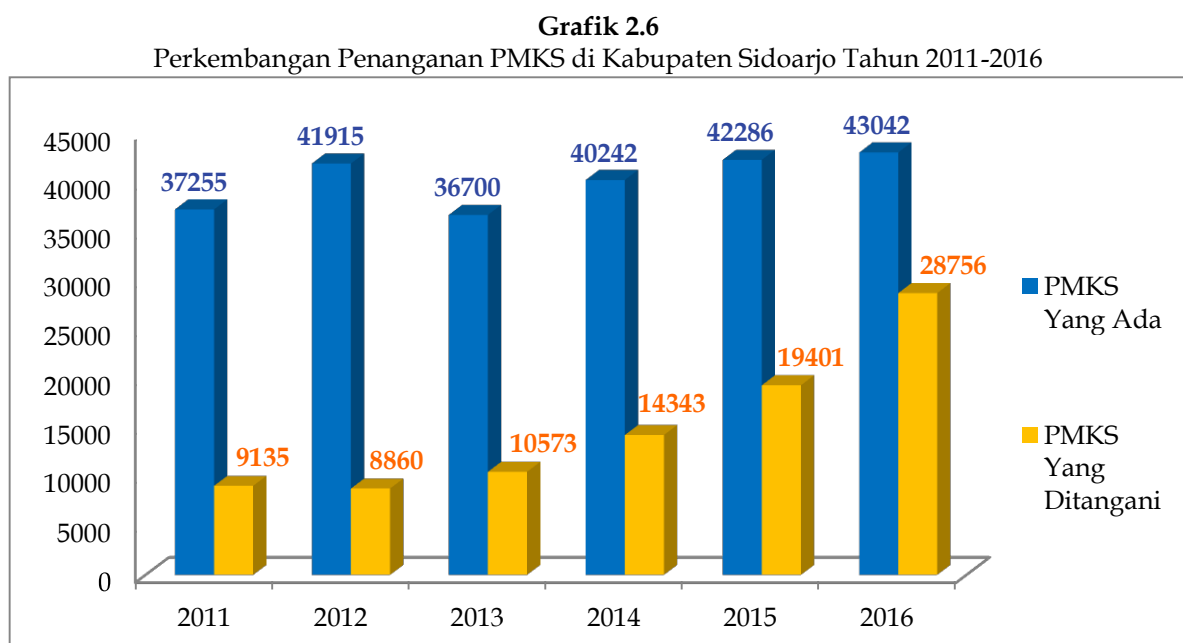
Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

PMKS menuntut perhatian yang serius bukan hanya dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo, namun juga menuntut partisipasi aktif dari masyarakat dan pelaku pembangunan lainnya. Hal tersebut sangat dibutuhkan guna menekan populasi permasalahan sosial yang terjadi. Pola penanganan yang telah dikembangkan selama ini untuk mengurangi jumlah masyarakat PMKS adalah melalui peningkatan kualitas SDM PMKS. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan serta perlindungan sosial untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

2.3.2 *Persentase Jumlah Penanganan PMKS*

Indikator ini menunjukkan komitmen pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengentaskan komunitas masyarakat PMKS melalui program-program pemberdayaan dan bantuan modal untuk usaha ekonomi. Pengukuran kinerja atas indikator dilakukan dengan membandingkan jumlah masyarakat PMKS yang ditangani melalui pemberian modal kerja dan pelatihan pengembangan ketrampilan usaha serta perlindungan sosial dengan jumlah masyarakat PMKS di Kabupaten Sidoarjo maupun dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo.

Penanganan PMKS tahun 2016 mengalami kenaikan seperti tergambar pada grafik di bawah ini :



Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk mengoptimalkan penanganan para penyandang PMKS melalui antara lain :

- 1) Mengoptimalkan fungsi Komite Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas instansi yang terkait dengan kegiatan pengentasan kemiskinan, antara lain : program raskin, BLT, PNPM Mandiri,dll;
- 2) Melakukan pembekalan manajemen kewirausahaan dan memberikan sarana bagi orang tua anak jalanan.
- 3) Program Keluarga Harapan (PKH).
- 4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial melalui UPT Liponsos.

Tabel 2.6
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014	2011	2012	2013	2014
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mendapatkan Pelayanan Sosial				2.53	12.5	2	10	2.6	2.13	28.6	39.08	20.24	586.85446	6.993007	25.588536
2	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Yang Mandiri.				2.48	12.5	30	30	2.6	30	29.52	39.08	19.84	41.6666667	101.62602	76.765609
3	Jumlah Lembaga Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial				98	98	98	120	96	91	98	346	100	100	81.6666667	125

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Tabel 2.7
Capaian Indikator SPM Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015

No	Indikator Kinerja SMP	Target SPM Nasional	Realisasi Capaian Tahun ke
			2015
1	Persentase panti sosial skala Kabupaten/Kota yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	80	64
2	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	80	59
3	Persentase PMKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	80	46,49
4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensi yang telah menerima jaminan sosial	40	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

24 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

2.4.1 Tantangan

Tantangan merupakan suatu keadaan di masyarakat yang membutuhkan penanganan khusus sebagai solusi atas permasalahan yang ada. Berdasarkan kondisi masyarakat Kabupaten Sidoarjo, dapat diketahui bahwa tantangan Dinas Sosial di lima tahun yang akan datang tidaklah mudah. Hal ini didasarkan pada beberapa kondisi yang memang masih sangat membutuhkan penanganan yang serius.

Hasil analisis terhadap telaahan Renstra Kementerian Sosial, Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo pada lima tahun mendatang. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi dan sinergitas pelaksanaan dan penganggaran program pembangunan kesejahteraan sosial antara Pemerintah Pusat, provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, dalam rangka menciptakan pelaksanaan program pembangunan yang sistemik;
2. Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mendorong peningkatan komitmen daerah Kabupaten maupun kotamadya dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, sehingga berpengaruh pada pencapaian kinerja pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara umum dan dapat meningkatkan epektifitas;
3. Masih tingginya disparitas dan angka kemiskinan di Jawa Timur dan semakin berkembangnya variansi permasalahan kesejahteraan sosial, yang belum sebanding dengan kapasitas pelayanan sosial. Berdasarkan data dari bidang sosial Dinas Sosial dan Tenaga kerja Kabupaten Sidoarjo, jumlah PMKS pada tahun 2012 sebesar 41.915 jiwa. Hal ini terjadi karena kompleksnya permasalahan- permasalahan dalam penanganan PMKS (gelandangan, pengamen, anak jalanan, WTS, gelandangan psikotik) sehingga perlu adanya perlakuan khusus dalam menangani. Hal ini juga disebabkan akan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap PMKS. Fasilitasi pada pelayanan PKMS tidak gampang, karena perlu pendekatan-pendekatan yang berbeda;

4. Implikasi negatif perkembangan dinamika sosial yang memicu munculnya permasalahan sosial kontemporer, seperti human trafficking, pekerja migrant bermasalah, balita yang ditelantarkan, HIV/ AIDS, permasalahan sosial lintas provinsi/daerah dan lain lain;
5. Kecenderungan berkembangnya individualisme dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan semakin lunturnya nilai kesetiakawanan sosial;
6. Ketidakpastian iklim dan perubahan kondisi alam serta fluktuasi interaksi politik sosial budaya yang mengakibatkan resistensi terjadinya bencana alam dan sosial,
7. Berdasarkan data dari Provinsi Jawa Timur peran Komite Penanggulangan PMKS di Kabupaten Kota belum optimal;
8. Peran serta masyarakat dan dunia usaha masih perlu ditingkatkan, hal ini penting mengingat keterbatasan sumber dana pembangunan kesejahteraan sosial yang disediakan pemerintah.

2.4.2 *Peluang*

Peluang merupakan kumpulan dari hal-hal yang berpotensi sebagai faktor penunjang keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Selain berbagai tantangan yang dihadapi Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam menyelenggarakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial juga terdapat berbagai peluang yang dapat menjadi potensi dalam pengembangan pelayanan kesejahteraan sosial di Jawa Timur antara lain yaitu

- a. Dukungan peraturan dan perundang undangan sebagai penjunjang penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. Semakin meningkatnya Komitmen Legislatif dalam penyelenggaraan Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Jawa Timur;
- c. Semakin meningkatnya dukungan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI terhadap penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Timur;
- d. Berkembangnya kelembagaan sosial peduli permasalahan kesejahteraan sosial, yang diindikasikan dengan semakin meningkatnya jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di masyarakat.

Kabupaten Sidoarjo berpeluang adanya Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar-pilar partisipasi kesejahteraan sosial. Selain itu Akan

segera diresmikannya Liponsos (Lingkungan Pondok Sosial) sebagai tempat pelayanan dan bimbingan sosial bagi penyandang masalah sosial. Terdapat berbagai lembaga-lembaga sosial yang dapat diperbantukan oleh Dinas sosial dan Tenaga Kerja. Lembaga-lembaga sosial tersebut salah satu upaya dalam penanganan masalah rehabilitasi terhadap PMKS, salah satu bentuknya yaitu pendidikan moral, pelatihan keterampilan kerja untuk PMKS.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

31 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Analisis tersebut juga untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Berlaku demikian juga sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari isu- isu strategis yang ada, dapatlah ditarik inti permasalahan yang harus dihadapi oleh Dinas Sosial karena terikat pada tupoksinya sebagai pelaksana teknis urusan sosial. Adapun permasalahan- permasalahan tersebut sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat Ini	Standar Yang Digunakan	Faktor Yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
Operasionalitas Teknis Administrasi Perkantoran	Belum Optimal Efisiensi Maupun Efektif Dalam Operasionalnya	Capaian Program Rutin	Mengendalikan Operasionalitas Administrasi Perkantoran	Mekanisme Pengadaan Jasa Dari Luar Internal	Masih Rendahnya Efisiensi Terhadap Operasionalitas Teknis Administrasi Perkantoran
Pelayanan PMKS	PMKS Yang Semakin Bertambah Dari Luar Daerah	Jumlah PMKS	<ul style="list-style-type: none"> Kurangnya Tenaga SDM Dalam Pelayanan PMKS Optimalisasi Pelatihan Dan Pendidikan Keterampilan PMKS 	PMKS Yang Bertambah Dari Luar Daerah	Kurang Optimalnya Pelayanan Sosial Yang Diberikan Kepada PMKS

Sumber : Data Diolah

32 Telaah Visi, Misi, serta Program Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo Terpilih

Berdasarkan kondisi masyarakat dan lingkungan Kabupaten Sidoarjo saat ini , Bupati dan Wakil Bupati terpilih memiliki visi sesuai dengan potensi Kabupaten Sidoarjo. Visi kepala daerah terpilih periode 2016-2021 adalah :

“Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera Dan Berkelanjutan”

Berdasarkan visi tersebut dijabarkan **dalam 5 misi dan 9 sasaran** yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan;

Sasaran 1 Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan pemanfaatan teknologi informasi

2. Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat;

Sasaran 3 Meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat

Sasaran 4 Meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat

3. Meningkatkan Kualitas dan Standar Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;

Sasaran 5 Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat

Sasaran 6 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

4. Meningkatkan Tataan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlakul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban;

Sasaran 7 Meningkatkan keamanan, kenyamanan dan ketertipan umum yang Berkeadilan

5. Infrastruktur Publik yang Memadai dan Berkualitas Sebagai Penunjang Pertumbuhan Ekonomi dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Sasaran 8 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infra srtuktur daerah

Sasaran 9 Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup

Memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo terpilih, maka tupoksi Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terkait pada misi pertama dan keempat. Dalam upaya mendukung pencapaian terhadap visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka perlu terlebih dahulu diidentifikasi faktor penghambat maupun faktor pendorong. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan detail faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih.

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Terhadap Pencapaian Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Visi : Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri, Sejahtera dan Berkelanjutan				
No	Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Inovatif, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan	1. Perlu penguatan pada kompetensi aparatur Dinas Sosial 2. Tata kelola administrasi perkantoran yang kurang efektif dan efisien	Masih terbatasnya kapasitas sdm aparatur	Komitmen pemimpin untuk memperbaiki kinerja aparatur
2	Meningkatnya Perekonomian Daerah melalui Optimalisasi Potensi Basis Industri Pengolahan, Pertanian, Perikanan, Pariwisata, UMKM dan Koperasi serta Pemberdayaan Masyarakat	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial masih tinggi	Kualitas Penanganan yang kurang memadai,	Terdapat lembaga – lembaga sosial

Sumber : Data Diolah

33 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu acuan bagi penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Hal ini dilakukan agar program/kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tetap linier dengan program/kegiatan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian ketika pemerintah pusat menghendaki capaian dari program/kegiatan yang disusun oleh Kementerian Sosial, pemerintah kabupaten dapat melaporkan sesuai dengan breakdown program/kegiatan tersebut.

Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur telah menetapkan sasaran strategis yang dimuat dalam renstra Pemerintah Provinsi, yaitu:

1. Meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS);
2. Meningkatkan partisipasi potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya dilakukan identifikasi terhadap permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berdasarkan sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur beserta faktor penghambat dan faktor pendorong. Tabel di bawah ini akan memperlihatkan hasil identifikasi tersebut.

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

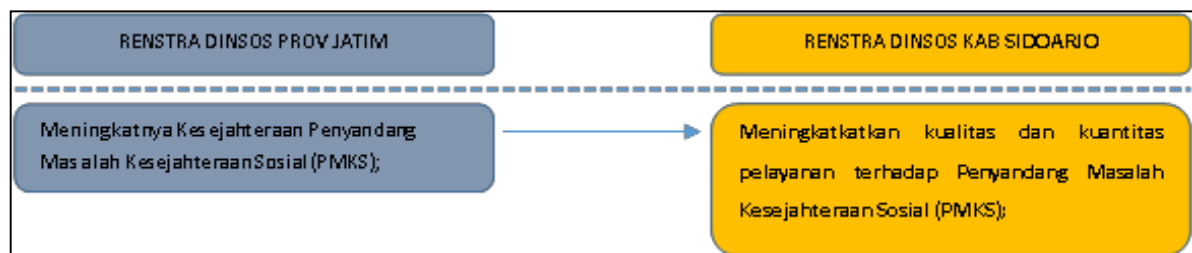
No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur	Permasalahan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Masih tingginya jumlah PMKS	Kebijakan yang kurang efektif dalam penanganan	Lembaga-lembaga sosial yang ada di Kabupaten Sidoarjo
		Penanganan PMKS kurang optimal	Jumlah anggaran yang terbatas	
		PMKS datang dari luar Kabupaten Sidoarjo	Daya tarik Kabupaten Sidoarjo	
		Meningkatnya jumlah urbanisasi		

Sumber : Data Diolah

Secara substantif kedua sasaran strategis ini telah direpresentasikan oleh sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Bahkan secara linear mampu terjawab dengan tegas. Saat Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), maka renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo juga berfokus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberian bantuan dan pelayanan PMKS melalui optimalisasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan bantuan dari berbagai pihak yang ada. Untuk memudahkan pemahaman terhadap linearitas tersebut, berikut peta linearitas tersebut :

Gambar 3.1

Linearitas Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo



Sumber : Data Diolah

34 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo tahun 2009-2029 menyebutkan bahwa visi penataan wilayah Kabupaten Sidoarjo adalah terciptanya Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah industri,

perdagangan, pertanian, serta permukiman yang harmoni dan berkelanjutan. Kondisi inilah yang secara berangsur akan diwujudkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam pembangunan 5 tahun mendatang. Apabila dihubungkan dengan tupoksi dari masing-masing Perangkat Daerah, maka Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tidak memiliki keterkaitan tupoksi dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sidoarjo.

35 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan identifikasi permasalahan pembangunan Dinas Sosial pada level Provinsi Jawa Timur dan permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis Kabupaten Sidoarjo disusun untuk pembenahan dan dipertahankan.

Berdasarkan hasil analisa permasalahan yang sudah dilakukan, terdapat beberapa isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo yaitu antara lain :

1. Kecenderungan PMKS yang terus meningkat;
2. Penanganan PMKS yang masih rendah/belum optimal;
3. Pemberdayaan Lembaga Kesejahteraan Sosial masih kurang efektif;
4. Masih rendahnya efisiensi terhadap operasionalitas teknis administrasi perkantoran.

Beberapa isu strategis yang berhasil diidentifikasi kemudian diberikan skoring. Tabel di bawah ini akan mengupas secara detail pemetaan kriteria isu-isu strategis sebagai skoring dari isu-isu strategi.

Tabel 3.4
Skor Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis

No	Kriteria *)	Bobot **)
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra K/L atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
Total		100

Sumber : Data Diolah

Hasil perhitungan terhadap beberapa isu strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
 Nilai Skor Kriteria Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Penyandang PMKS yang cenderung meningkat;	20	10	10	10		25	65
2	Penanganan PMKS yang masih rendah/belum optimal	20	10	20	10	8	25	93
3	Pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial masih kurang efektif;	10	10		10			30
4	Masih rendahnya efisiensi terhadap operasionalitas teknis administrasi perkantoran		20			10		20

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan telaah analisis permasalahan dan tingkat prioritas, isu strategis Dinas Sosial di Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Penanganan PMKS yang masih rendah/belum optimal;
2. Kecenderungan PMKS yang terus meningkat;
3. Pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial masih kurang efektif;
4. Masih rendahnya efisiensi terhadap operasionalitas teknis administrasi perkantoran.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGGAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Strategis mengacu visi dan misi kepala daerah yang terpilih, guna menyelaraskan hal tersebut maka perlu menerjemahkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo. Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo merupakan hasil yang diharapkan kepala daerah dalam periode jabatannya. Sesuai dengan tupoksi maka sasaran RPJMD yang diakomodir oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo adalah :

“Menurunnya jumlah masyarakat miskin “

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

4.1.1 Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Penyelenggaraan pelayanan Sosial pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang berfungsi memfasilitasi kegiatan-kegiatan sosial. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam memberikan pelayanan harus menetapkan suatu tujuan sebagai arahan SKPD di masa yang akan datang. Penentuan Tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dan hasil yang ingin dicapai.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal- hal yang perlu dilakukan agar SKPD secara langsung dapat mendukung ketercapaian visi misi Kabupaten Sidoarjo. Penentuan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo sangat penting, mengingat dari tujuan dan sasaran SKPD ini nantinya akan membantu mencapai visi/misi Bupati/Wakil Bupati yang tertuang dalam dokumen RPJMD. Dengan adanya tujuan dan sasaran SKPD, maka akan menjadi dasar penyusunan program/ kegiatan SKPD selama lima tahun ke depan.

Tujuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial wajib mendukung visi dan misi Bupati Kabupaten Sidoarjo yang dijabarkan pada sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Tujuan Dinas Sosial harus mengacu dengan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang telah ditetapkan yang sesuai dengan tugas pokok fungsi Dinas yaitu **“Menurunkan jumlah penduduk miskin “**.

4.1.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Setelah menetapkan tujuan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Sasaran adalah hasil yang

diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Guna mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka Dinas Sosial menjabarkannya dalam suatu sasaran, yaitu **Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)**.

Kesesuaian antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan dan sasaran SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Kesesuaian Antara RPJMD Kabupaten Sidoarjo Dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya tatanan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah berlandaskan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.	Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang rukun, aman, tertib, nyaman dan berkeadilan.	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Menurunkan jumlah penduduk miskin	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase Penurunan PMKS Terhadap Penduduk

Sumber : Data Diolah

Memperhatikan tabel 4.1 di atas, terlihat bahwa tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo linier dengan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo termasuk indikatornya.

Guna memperoleh sasaran yang dapat dicapai, maka indikator kinerja perlu ditentukan. Indikator kinerja disusun dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Indikator Kinerja direncanakan dalam periode lima tahun. Tabel pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah sampai indikator kinerja pelayanan SKPD selanjutnya disusun dalam tabel berikut.

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Tujuan	Sasaran	Indikator	Capaian Awal Tahun	TARGET (%)					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Menurunkan jumlah penduduk miskin)	Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Prosentase penurunan PMKS Terhadap Penduduk		1,96	1,93	1,90	1,87	2,23	1,81

Sumber : Data Diolah

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Di sini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, Dan Threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.3
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

(+) Kekuatan	(+) Peluang
Keberpihakan pemerintah terhadap urusan sosial	Adanya potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar-pilar partisipasi kesejahteraan sosial
(-) Kelemahan	(-) Ancaman
Rendahnya Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Semakin tingginya tingkat urbanisasi ke Sidoarjo yang membuat semakin bertambahnya PMKS

Sumber : Data Diolah

Identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil Dinas Sosial dirumuskan alternatif strategi sebagai berikut :

Tabel 4.4
Analisis SWOT Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Faktor Eksternal	Peluang	Tantangan
Faktor Internal	Adanya potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) sebagai pilar-pilar partisipasi kesejahteraan sosial	Banyaknya urbanisasi dari luar kota
Kekuatan	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :
Keberpihakan pemerintah terhadap urusan sosial	Meningkatkan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Mengoptimalkan fasilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial
Kelemahan	Alternatif Strategi :	Alternatif Strategi :
1. Kurang tersedianya database PMKS yg mudah memberikan informasi yang akurat. 2. Rendahnya Kualitas Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Membuatkan website yang terhubung ke kecamatan untuk menampung data kemiskinan	

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan pada analisis tersebut, maka terdapat dua alternatif strategi sebagai berikut:

St-1 : Mengoptimalkan fasilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial (S-T)

St-2 : Meningkatkan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (S-O)

Strategi yang diinisiasi berdasarkan pada analisis isu strategis serta analisis SWOT tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

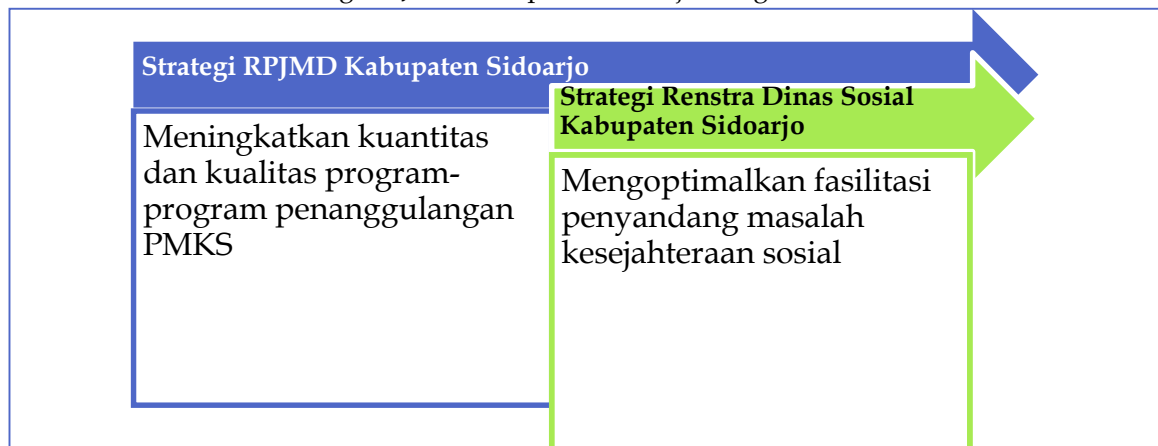
- **Mengoptimalkan fasilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial**

Masalah ketunasosialan yang gelandangan dan pengemis serta tuna susila, selain disebabkan oleh kemiskinan juga disebabkan oleh ketidakmampuan individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemampuan individu untuk hidup dan bekerja sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan lainnya. Maka dengan mengoptimalkan

penyelenggaraan rehabilitasi maupun pembinaan terutama dengan penyiapan sarana rehabilitasi sosial (Lingkungan Pondok Sosial) yang representatif serta memberikan pembinaan keterampilan agar lebih produktif.

- **Meningkatkan pengembangan kapasitas kelembagaan Dinas Sosial.** Pengembangan kapasitas kelembagaan menekankan pada kemampuan organisasi dalam tata kelola organisasi. Kapasitas kelembagaan perlu ditingkatkan untuk menyediakan SDM yang berkualitas serta dalam mengatur efisiensi penggunaan sarana prasarana internal aparatur. Pengembangan kapasitas kelembagaan berfungsi untuk mendukung ketercapaian segala penyelenggaraan tugas dinas sosial .

Gambar 4.1
Keterkaitan Strategi RPJMD Kabupaten Sidoarjo Dengan Renstra Dinas Sosial



Merujuk pada strategi-strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada *balanced scorecard* (BSC) melalui empat perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan. Adapun definisi masing masing tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan;
2. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa public, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai;
3. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-

upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah;

4. Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut, maka kebijakan-kebijakan tersebut dapat dirincikan sebagai berikut:

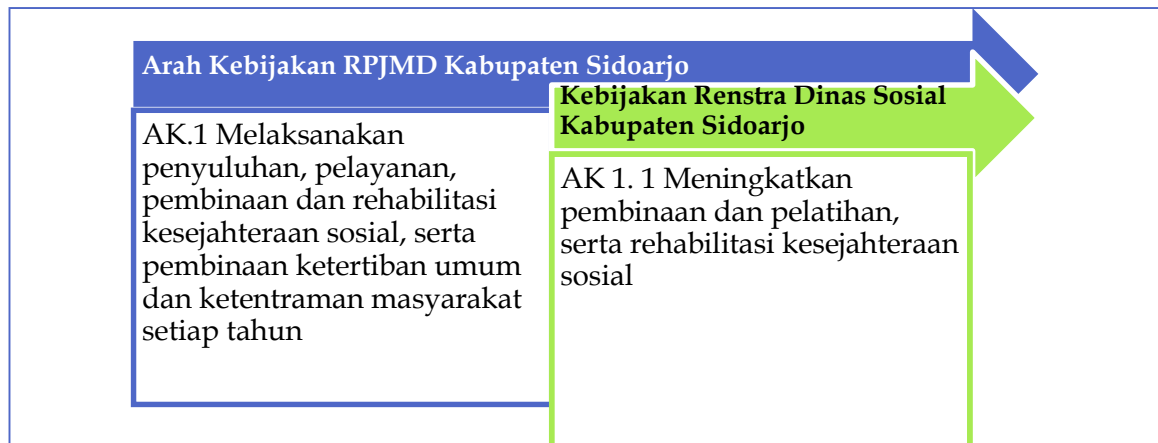
Tabel 4.5
Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

No	Perspektif	Strategi : Mengoptimalkan fasilitasi penyanggah masalah kesejahteraan sosial	
		Kebijakan Umum	Indikator
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan pembinaan dan pelatihan, serta rehabilitasi kesejahteraan sosial	Penanganan PMKS
2	Perspektif Proses Internal		
3	Perspektif Kelembagaan		
4	Perspektif Keuangan		

Sumber : Data Diolah

Gambar 4.2

Keterkaitan Arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Sidoarjo Dengan Kebijakan Dinas Sosial



Kebijakan yang telah dihasilkan oleh BSC yang bersumber dari strategi harus dapat linier dengan Tujuan dan Sasaran SKPD. Matriks linieritas antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Menurunkan jumlah penduduk miskin	S. 1 Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	St.1 Mengoptimalkan Fasilitas Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan Pembinaan Dan Pelatihan, Serta Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Sumber : Data Diolah

Matrik linieritas tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tersebut bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan masing-masing komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, dan indikator kegiatan. Hal tersebut bertujuan untuk melihat hierarki kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam struktur jabatan (eselon), sehingga dapat diketahui tanggungjawab masing-masing eselon. Penjabaran tersebut memberikan kemudahan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam menyusun perjanjian kinerja, dan komponen lainnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kerangka keterkaitan tersebut disajikan dalam pohon kinerja di bawah ini.

Tabel 4.7
Pohon Kinerja Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Sasaran RPJMD	Menurunnya jumlah masyarakat miskin		
Tujuan Renstra	Menurunkan jumlah penduduk miskin.		
Sasaran Eselon II	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		
Program Eselon III	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kegiatan Eselon IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin. 2. Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Lingkungan Bagi Keluarga Miskin. 3. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Sosial Dan PSKS Lainnya, 4. Pembinaan Yayasan Panti Asuhan. 5. Pengadaan Rastra APBD. 6. Fasilitasi Dan Monev Bantuan Pangan APBN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Tuna Sosial, 2. Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas. 3. Pembinaan Dan Pelayanan Sosial Bagi Anak Dan Lansia 4. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam. 2. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial. 3. Fasilitasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial
---------------------------	--	--	---

Sumber : Data Diolah

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Penyusunan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta telah dilakukan penyesuaian dengan RPJMD dan hasil restrukturisasi program dan kegiatan. Terdapat enam program hasil restrukturisasi, yang terdiri dari tiga program rutin/ administratif dan tiga bidang teknis diantaranya (i) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya; (ii) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial; dan (iii) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Upaya mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo diwujudkan dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Dinas Sosial adalah penanganan PMKS. Pelaksanaan strategi dan kebijakan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya dijabarkan dalam program dan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Program Yang terdapat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 merupakan program prioritas yang terdapat dalam RPJMD. Rencana program yang terdapat dalam RPJMD ini juga disertai dengan indikator

program (*outcome*). Indikator ini merupakan alat untuk mengukur manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah yang mencerminkan program tersebut.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, terdapat program dan kegiatan yang berimplikasi pada ketercapaian tujuan dan sasaran. Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing bidang di Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo antara lain :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
 - d. Penyediaan Jasa Kebersihan/ Keamanan Kantor/ Pengemudi;
 - e. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
 - f. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor;
 - g. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - h. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - i. Penyediaan Bahan Bakar Logistic Kantor;
 - j. Penyediaan Makanan Dan Minuman;
 - k. Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Dan Dalam Daerah;
 - l. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - m. Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan.
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Meubelair;
 - b. Pengadaan Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor;
 - c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
 - d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
 - e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Dan Peralatan Gedung Kantor;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Dan Capaian Kinerja Keuangan
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Laporan Capaian Kinerja Dinas Sosial.
4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (Kat) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Lainnya

- a. Pelatihan Keterampilan Bagi Keluarga Miskin;
 - b. Fasilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Lingkungan Bagi Keluarga Miskin;
 - c. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Sosial Dan Psks Lainnya;
 - d. Pembinaan Yayasan Panti Asuhan;
 - e. Pengadaan Rastra Apbd;
 - f. Fasilitasi Dan Monev Bantuan Pangan Apbn
5. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- a. Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Tuna Sosial;
 - b. Pembinaan Dan Pelatihan Keterampilan Bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. Pembinaan Dan Pelayanan Sosial Bagi Anak Dan Lansia;
 - d. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
6. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
- a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 - b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial;
 - c. Fasilitasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial.

Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo merupakan OPD baru pada tahun 2017, di mana sebelumnya merupakan salah satu bidang yang berada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Dalam pembuatan rancangan Renstra, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo masih mengacu pada DPA Tahun 2017. Terkait dengan anggaran, dalam hal ini masih membawa anggaran yang berasal dari bidang Bina Sosial, Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal pembuatan target di Matriks Renstra, Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo mengacu pada surat undangan review renstra pada tanggal 11 Juli 2017 yang menyebutkan bahwa untuk OPD baru pencantuman kondisi awal digunakan Tahun 2017, kemudian target yang dicantumkan Tahun 2017-2020 dan kondisi akhir yaitu Tahun 2021.

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Perubahan Nomenklatur Berdasarkan Keperendagri 050-3708 Tahun 2020		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi							
							Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)						
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp					
Menurunkan jumlah penduduk miskin	Menurunnya Angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase penurunan PMKS Terhadap Penduduk		1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kepuasan aparaturnya OPD terhadap pelayanan administrasi perkantoran	74,11%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan aparaturnya perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	70%	1.716.620.000	80%	1.254.890.000	80%	1.380.379.000	80%	1.518.416.900	80%	1.670.258.590	80%	7.540.564.490	Sekretariat	Kab. Sidoarjo					
									a. Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat masuk dan keluar yang dikelola	11.384 Surat	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	11.384 Surat	2.250.000	1.000 Surat	2.250.000	1.000 Surat	2.475.000	1.000 Surat	2.722.500		1.000 Surat	2.995.000	15.384 Surat	12.692.500	Sub Bidang Umum dan Kepegawaian
									b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya biaya rekening air, listrik, dan telepon cukup tersedia sesuai kebutuhan	12 Bulan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	12 Bulan	380.000.000	12 Bulan	289.000.000	12 Bulan	317.900.000	12 Bulan	349.690.000		12 Bulan	384.659.000	12 Bulan	1.721.249.000	
									c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan roda dua yang dipelihara dan STNK serta uji KIR yang diurus	15 Unit	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	12 unit	13.000.000	15 Unit	28.500.000	15 Unit	31.350.000	15 Unit	34.485.000		15 Unit	37.933.500	15 Unit	145.268.500	
									d. Penyediaan Jasa Kebersihan/Keamanan Kantor/Pengemudi	a. Jumlah Tenaga Kebersihan/Keamanan kantor/pengemudi b. Jumlah alat kebersihan/keamanan yang diadakan	a. 3 Orang b. 16 Jenis	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	4 Tenaga Kebersihan dan 35 jenis alat	196.800.000	a. 3 Orang b. 16 Jenis	198.600.000	a. 3 Orang b. 16 Jenis	218.460.000	a. 3 Orang b. 16 Jenis	240.306.000		a. 3 Orang b. 16 Jenis	246.336.600	a. 3 Orang b. 16 Jenis	1.100.502.600	

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)	
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				e. Penyediaan alat tulis kantor	Jenis dan jumlah alat tulis kantor yang disediakan	41 Jenis			41 Jenis	50.000.000	41 Jenis	60.750.000	41 Jenis	66.825.000	41 Jenis	73.507.500	41 Jenis	80.585.250	41 Jenis	331.667.750		
				f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan kantor yang disediakan	5 Macam			5 Macam	20.000.000	5 Macam	25.000.000	5 Macam	27.500.000	5 Macam	30.250.000	5 Macam	33.275.000	5 Macam	136.025.000		
				g. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan sesuai kebutuhan	1 Macam Surat Kabar			4 Macam Surat kabar	8.400.000	1 Macam Surat Kabar	5.000.000	1 Macam Surat Kabar	5.500.000	1 Macam Surat Kabar	6.050.000	1 Macam Surat Kabar	6.655.000	1 Macam Surat Kabar	31.605.000		
				h. Penyediaan bahan bakar logistik kantor	Jumlah bahan bakar logistik kantor yang tersedia sesuai kebutuhan	29.185 liter			29.185 Liter	291.850.000	26.000 Liter	260.000.000	26.000 Liter	286.000.000	26.000 Liter	314.600.000	26.000 Liter	346.060.000	133.185 Liter	1.498.510.000		
				i. Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman yang tersedia sesuai kebutuhan	300 Nasi Kotak			300 Nasi Kotak dan 325 Snack	20.000.000	300 Nasi Kotak	10.750.000	300 Nasi Kotak	11.825.000	300 Nasi Kotak	13.007.500	300 Nasi Kotak	14.308.250	1.500 Nasi Kotak	69.890.750		
				j. Rapat-rapat koordinasi luar daerah dan dalam	a. Jumlah Rapat Koordinasi Dalam Daerah yang Dilaksanakan b. Jumlah Rapat Koordinasi Luar Daerah yang Dilaksanakan	a. 75 Kali b. 75 Kali			75 Rapat Koordinasi	195.000.000	a. 75 Kali b. 75 Kali	110.000.000	a. 75 Kali b. 75 Kali	121.000.000	a. 75 Kali b. 75 Kali	133.100.000	a. 75 Kali b. 75 Kali	146.410.000	a. 75 Kali b. 75 Kali	705.510.000		

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				k. Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan	23 Orang	22 Orang	281.520.000	22 Orang	215.040.000	22 Orang	236.544.000	22 Orang	260.198.400	22 Orang	286.218.240	22 Orang	1.279.520.640		
				l. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jenis dan jumlah barang cetakan dan penggandaan	9 Jenis	9 Jenis	65.000.000	9 Jenis	50.000.000	9 Jenis	55.000.000	9 Jenis	60.500.000	9 Jenis	66.550.000	45 Jenis	297.050.000		
				2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi	90%	81,30%	896.500.000	90%	359.860.000	90%	395.846.000	90%	435.430.600	90%	478.973.660	90%	2.566.610.260		
				a. Pengadaan meubeleu	Jenis dan jumlah meubeleu yang diadakan	3 Jenis	0	0	3 Jenis	13.000.000	3 Jenis	14.300.000	3 Jenis	15.730.000	3 Jenis	17.303.000	12 Jenis	60.333.000	Sekretariat	Kab. Sidoarjo
				b. Pengadaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang diadakan	13 Unit	12 Jenis 25 Unit	236.180.000	13 Unit	60.000.000	13 Unit	66.000.000	13 Unit	72.600.000	13 Unit	79.860.000	77 Unit	514.640.000	Sub Bidang Umum dan Kepegawaian	
				c. Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Jumlah unit gedung yg dipelihara	2 Unit	2 Unit	269.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	110.000.000	2 Unit	121.000.000	2 Unit	133.100.000	2 Unit	733.100.000		
				d. Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Jenis dan jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	8 Unit	12 Unit	80.000.000	8 Unit	150.000.000	8 Unit	165.000.000	8 Unit	181.500.000	8 Unit	199.650.000	8 Unit	776.150.000		

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				e. Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan dan peralatan gedung kantor	Jenis dan jumlah perlengkapan dan peralatan gedung kantor yang dipelihara	4 Jenis	4 Jenis 60 unit	40.000.000	4 Jenis	36.860.000	4 Jenis	50.546.000	4 Jenis	44.600.600	4 Jenis	49.060.660	4 Jenis	221.067.260		
				3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang tepat waktu	90%	100%	50.000.000	90%	68.692.000	90%	75.561.200	90%	83.117.320	90%	91.429.052	90%	368.799.572	Sekretariat	Kab. Sidoarjo
				a. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja Bappeda	a. Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun b. Jumlah laporan capaian kinerja PD yang disusun c. Jumlah system informasi PD yang dikelola	a. 1 Dokumen b. 5 Laporan c. 1 Paket	a. 1 Dokumen b. 5 Laporan	50.000.000	a. 1 Dokumen b. 5 Laporan c. 1 Paket	68.692.000	a. 1 Dokumen b. 5 Laporan c. 1 Paket	75.561.200	a. 1 Dokumen b. 5 Laporan c. 1 Paket	83.117.320	a. 1 Dokumen b. 5 Laporan c. 1 Paket	91.429.052	a. 5 Dokumen b. 25 Laporan c. 5 Paket	368.799.572	Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	
				4. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase fakir miskin yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya. Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	45,88% 50,1 %	N N	N N	60% 55,1 %	5.926.702.600	60% 60,6 %	6.519.372.860	60% 66,7 %	7.171.310.146	60% 73,2 %	7.888.441.161	60% 73,2 %	27.505.826.767	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	Kab. Sidoarjo
				a. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin	a. Jumlah keluarga miskin yang dilatih b. Jumlah keluarga miskin yang dimonev dalam menerapkan hasil pelatihan	a. N/A b. N/A	N N	N N	a. 415 orang b. 100 Orang	291.535.000	a. 415 orang b. 100 Orang	320.688.500	a. 415 orang b. 100 Orang	352.757.350	a. 415 orang b. 100 Orang	388.033.085	a. 1.660 orang b. 400 Orang	1.353.013.935	Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan	

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				b. Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung lingkungan bagi keluarga miskin	a. Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi sarana prasarana yang mendukung lingkungannya b. Monev sarana prasarana pendukung lingkungan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Penataan Lingkungan		
				c. Peningkatan kualitas kelembagaan sosial dan PSKS lainnya	a. Jumlah peserta rakor dari sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan b. Jumlah PSKS yang dibina	200 Orang	N	N	a. 100 Orang b. 10 PSKS	178.500.000	a. 100 Orang b. 10 PSKS	196.350.000	a. 100 Orang b. 10 PSKS	215.985.000	a. 100 Orang b. 10 PSKS	237.583.500	a. 400 Orang b. 40 PSKS	828.418.500	Seksi Kelembagaan Sosial, Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	
				d. Pembinaan Yayasan Pantii Asuhan	Jumlah peserta pantii binaan	N/A	N	N	10 Pantii Asuhan	47.600.000	10 Pantii Asuhan	53.360.000	10 Pantii Asuhan	57.596.000	10 Pantii Asuhan	63.355.600	40 Pantii Asuhan	221.911.600		
				e. Pengadaann Rastra APBD	Jumlah fakir miskin penerima Rastra APBD	4.209 RTSPM	N	N	353 Orang	5.066.140.000	353 Orang	5.572.754.000	353 Orang	6.130.029.400	353 Orang	6.743.032.340	1.412 Orang	23.511.955.740	Seksi Penanganan Fakir Miskin	
				f. Fasilitasi dan Monev Bantuan Pangan APBN	Jumlah penerima bantuan pangan APBN yang dimonev	N/A	N	N	81.088 RTSPM	342.927.600	81.088 RTSPM	377.220.360	81.088 RTSPM	414.942.396	81.088 RTSPM	456.436.635	324.352 RTSPM	1.591.526.991		
				5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	a. Prosentase Tuna Sosial yang terlayani	20,25 %	19,71 %	N	17,92 %	10.118.252.000	17,92 %	3.130.077.200	17,92 %	4.243.084.920	17,92 %	5.467.393.400	17,92 %	22.958.807.520	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	Kab. Sidoarjo
					b. Prosentase Penyandang Disabilitas yang terlayani	0,77 %	0,77 %		2,32 %	10.118.252.000	2,90 %	3.130.077.200	3,48 %	4.243.084.920	4,06 %	5.467.393.400	5,5 %	22.958.807.520		

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
					c. Persentase Anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani.	16,25 %	50,90 %		47,06 %		47,08 %		47,09 %		47,11 %		48 %			
							15,48 %		27,09 %		27,09 %		27,09 %		27,09 %		27,09			
					Persentase 5 PMKS yang terlayani	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
				a. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Tuna Sosial	a. Jumlah PMKS (18 jenis) yang dibina b. Jumlah PMKS (18 jenis) yang dimonev	N/A	N	N	a. 300 Orang b. 170 Orang	292.620.000	a. 300 Orang b. 170 Orang	321.882.000	a. 300 Orang b. 170 Orang	354.070.200	a. 300 Orang b. 170 Orang	389.477.220	a. 1.200 Orang b. 680 Orang	1.358.049.420	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
				b. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang Disabilitas	a. Jumlah Penyandang Disabilitas yang dibina b. Jumlah Penyandang Disabilitas yang dimonev	200 Orang	N	N	a. 60 Orang b. 60 Orang	181.380.000	a. 60 Orang b. 60 Orang	199.518.000	a. 60 Orang b. 60 Orang	219.469.800	a. 60 Orang b. 60 Orang	241.416.780	a. 240 Orang b. 240 Orang	841.784.580	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat	
				c. Pembinaan dan Pelayanan Sosial bagi Anak dan Lansia	a. Jumlah Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dibina b. Jumlah Anak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dimonev c. Jumlah Lansia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dibina d. Jumlah Lansia Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dimonev	4.029 RTSPM	N	N	a. 200 Orang b. 200 Anak c. 200 Orang d. 50 Anak	182.400.000	a. 200 Orang b. 200 Anak c. 200 Orang d. 50 Anak	200.640.000	a. 200 Orang b. 200 Anak c. 200 Orang d. 50 Anak	220.704.000	a. 200 Orang b. 200 Anak c. 200 Orang d. 50 Anak	242.774.400	a. 800 Orang b. 800 Anak c. 800 Orang d. 200 Anak	846.518.400	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia	

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Sasaran OPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja OPD Penanggung jawab	Lokasi		
							Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD (2021)	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				d. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana Prasarana Rehabilitais Kesejahteraan Sosial	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang dibina dan dilayani	75 orang	N	N	75 orang	9.461.852.000	80 orang	2.408.037.200	80 orang	3.448.840.920	90 orang	4.593.725.000	90 orang	43.912.455.120	Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial	
				6. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Persentase Korban Bencana Alam yang tertangani b. Persentase Korban Bencana Sosial yang tertangani c. Persentase Penduduk Miskin yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial	45,88%	N	N	a. 90% b. 80% c. 80%	346.270.000	a. 90% b. 80% c. 80%	380.897.000	a. 90% b. 80% c. 80%	418.986.700	a. 90% b. 80% c. 80%	460.866.370	a. 90% b. 80% c. 80%	1.607.039.070	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Kab. Sidoarjo
				a. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	a. Jumlah sarana prasarana korban bencana alam b. Jumlah Personil Tagana yang dibina	N/A	N	N	a. 7 unit b. 50 orang	167.280.000	a. 7 unit b. 50 orang	184.008.000	a. 7 unit b. 50 orang	202.408.800	a. 7 unit b. 50 orang	222.649.680	a. 7 unit b. 50 orang	776.346.480	Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	
				b. Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial	a. Jumlah korban bencana sosial yang difasilitasi b. Jumlah sarana prasarana korban bencana sosial yang disediakan	200 Orang	N	N	a. 20 orang B. 58 orang	63.120.000	a. 20 orang B. 58 orang	69.432.000	a. 20 orang B. 58 orang	76.375.200	a. 20 orang B. 58 orang	84.012.720	a. 20 orang B. 58 orang	292.939.920		
				c. Fasilitasi Perlindungan dan Jaminan Sosial	a. Jumlah pendamping PKH yang dibina b. Jumlah peserta Bimtek Varifikasi dan Validasi c. Jumlah Rakor/ Sosialisasi Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	N/A	N	N	a. 91 Orang b. 91 Orang c. 4 Kali	115.870.000	a. 91 Orang b. 91 Orang c. 4 Kali	127.457.000	a. 91 Orang b. 91 Orang c. 4 Kali	140.202.700	a. 91 Orang b. 91 Orang c. 4 Kali	154.222.970	a. 91 Orang b. 91 Orang c. 4 Kali	537.752.670	Seksi Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial	

Tabel 5.2

Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Berdasarkan Pemutakhiran Permendagri No.90 Tahun 2019 (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Surat Bina Keuda Kemendagri tanggal 12 Oktober 2020 Nomor 050/4189/Keuda)

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan			
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti		Rp	7.955.374
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	4 Dokumen	Rp	1.221.164
	2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen		
	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen		
	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	Rp	1.289.390
	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 Dokumen	Rp	1.289.390
	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan kinerja PD yang disusun tepat waktu	5 Dokumen	Rp	2.837.260
	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 Dokumen	Rp	1.318.170
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD		Rp	5.636.894.744
	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang	Rp	5.634.675.379
	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	-		
	03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah SPM yang diterbitkan	-		
	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	Rp	965.001
	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	12 Laporan	Rp	1.254.364
	08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang tersusun	2 Laporan		
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1. Persentase BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Persentase BMD SKPD yang telah tersertifikasi			

01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD yang disusun	1 Laporan	
02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah BMD SKPD yang telah teregistrasi 2. Jumlah BMD SKPD yang telah tersertifikasi	1. 1202 Unit 2. -	
03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD SKPD yang dilakukan penilaian	-	
05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1. Jumlah rekonsiliasi BMD SKPD yang dilakukan 2. Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun	1. 4 Kali 2. 4 Laporan	
06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	1 Laporan	
07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1. Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik 2. Jumlah BMD SKPD yang dimanfaatkan	1. 1020 Unit 2. 1020 Unit	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1. Persentase ASN yang disiplin 2. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat		
01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah mesin absensi yang disediakan		
02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian (PDH) yang diadakan		
03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	a. Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun b. Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah		
05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja pegawai Perangkat Daerah yang dilakukan		
09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan informal		
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)		Rp 1.192.126.640
01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik /penerangan yang tersedia	5 Komponen	Rp 2.103.833
02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	18 Macam	Rp 21.455.444
04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1. Jumlah BBM yang disediakan 2. Jumlah logistik rumah tangga kantor yang tersedia	31860 Liter	Rp 318.600.000
05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan yang tersedia	450 Buah	Rp 2.305.463
06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang-undangan dan koran yang tersedia	4 Buah	Rp 3.720.000
08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	a. Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan b. Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	a. 354 Kotak b. 354 Kotak	Rp 14.445.000
09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	a. Persentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti b. Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	a. 100%	Rp 829.496.900
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis BMD yang diadakan		Rp 74.307.111
05	Pengadaan Mebel	Jumlah meubeleur yang diadakan		
06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung/kantor / rumah dinas/jabatan yang diadakan	6 Unit	Rp 74.307.111

8 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran		Rp 1.165.022.800
01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat keluar masuk yang dikelola	7000 Surat	Rp 240.000
02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	48 Tagihan	Rp 329.000.000
04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Jumlah tenaga kebersihan kantor yang terbayar 2. Jumlah tenaga keamanan kantor yang terbayar 3. Jumlah pengelola keuangan dan barang yang terbayar; 4.. Jumlah tenaga non ASN yang terbayar	1. 4 Orang 2. 4 Orang 3. 22 Orang 4. 26 Orang	Rp 835.782.800
8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan		Rp 212.139.584
02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara; 2. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia 3. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	1. 17 Unit 2. 0 Macam 3. 17 STNK	Rp 127.500.000
05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara		
06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		
09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor/rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	6631 M2	Rp 17.139.584
10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	2 Unit	Rp 6.000.000
11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	133 Unit	Rp 61.500.000

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Organisasi Perangkat Daerah
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	a.Persentase fakir miskin yang telah terpenuhi dasarnya b. Persentase PSKS yang berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		Rp. 17.530.126.879	DINAS SOSIAL
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ijin/rekomendasi yang dikeluarkan			
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Persentase ijin/rekomendasi yang dikeluarkan			
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	a.Jumlah PSM yang dibina b. jumlah peserta rakor/sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan c. Jumlah TKSK yang dibina d. Jumlah LKSA yang diberi pembinaan e. Jumlah PSKS lainnya yang dibina f. Jumlah LK3 yang dibina g. Jumlah panti sosial skala kabupaten yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial			
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Jumlah PSM yang dibina b. jumlah peserta rakor/sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan	a. - PSM b. - Orang	Rp 192.853.600	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota (TKSK) pemberdayaan	a. Jumlah TKSK yang dibina b. Jumlah peserta rakor / sosialisasi nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan	a. TKSK b. - Orang	Rp 432.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase PSKS keluarga yang dibina			
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	a. Jumlah LKSA yang diberi pembinaan b. Jumlah PSKS lainnya yang dibina	a. - LKSA b. - PSKS	Rp1.122.600.000	

	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah LK3 yang dibina	- LKS	Rp 5.573.279	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		a. Prosentase tuna sosial yang terlayani b. Prosentase penyandang disabilitas yang terlayani c. Prosentase anak dan lansia bermasalah sosial yang terlayani d. Prosentase PMKS yang terlayani		Rp 6.958.201.701	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	a. Prosentase penyandang disabilitas terlantar, b. anak terlantar, c. lansia terlantar, d. Gepeng yang mendapat pelayanan dan rehabilitasi sosial e. Jumlah warga kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tunasosial di luar panti f. Jumlah warga kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti g. Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti h. Jumlah warga kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti		6.898.164.581	
	Penyediaan Permakanan	1. Jumlah Anak Terlantar di Luar Panti yang Mendapat Bantuan Permakanan 2. Jumlah Gepeng Terlantar di Luar Panti yang Mendapat Bantuan Permakanan 3. Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti yang Mendapat Bantuan Permakanan	1. 1399 Anak 2. 900 Orang 3. 88 Orang	Rp5.688.200.718	
	Penyediaan Sandang	a. Jumlah Anak Terlantar yang Mendapat Bantuan Sandang b. Jumlah Lansia Terlantar yang Mendapat Bantuan Sandang	a. 50 Anak b. 75 Orang	Rp. 32.810.475	
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang mendapat alat bantu	16 Orang	Rp. 69.000.000	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar di luar panti yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga			

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Gepeng Terlantar yang Mendapat Bimbingan	900 Orang	Rp. 342.809.296	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	a. Jumlah Keluarga Anak Terlantar yang Mendapat Bimbingan b. Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar yang Mendapat Bimbingan	a. 50 Orang b. 88 Orang	Rp. 13.350.000	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, gepeng terlantar yang terlayani			
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasa	Persentase surat rekomendasi yang dikeluarkan			
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Tersedianya Layanan Data	12 Bulan	Rp. 63.412.116	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Tersedianya layanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis terlantar	12 Bulan	Rp. 688.581.976	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak dan Lansia terlantar, Gepeng di luar panti yang mendapat layanan penelusuran keluarga			
	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Penyandang Disabilitas, Anak dan Lansia terlantar, Gepeng di luar panti yang mendapat layanan rujukan			
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial		Rp. 60.037.120	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layana			
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan			
	Penyediaan Permakanan	Jumlah PMKS lainnya diluar panti yang mendapat bantuan permakanan	20 Orang	Rp. 14.937.120	
	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya			

		Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan sandang			
	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan perbekalan kesehatan			
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bantuan perbekalan kesehatan			
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah PMKS lainnya yang mendapat bimbingan	100 Orang	Rp 45.100.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan			
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan			
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan			
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layana			
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan			
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan			
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN		Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani			
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asa	Persentase Warga Negara Migran Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal			
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak	Persentase Warga Negara Migran Tindak Kekerasan			

	Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	yang dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal			
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL		Persentase fakir miskin yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya		Rp. 11.666.087.179	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah fakir miskin yang terdata b. Jumlah keluarga miskin yang dilatih c. Jumlah keluarga miskin yang dimonev d. Jumlah fakir miskin yang masuk program PKH e. Jumlah Rekom JKMM yang dikeluarkan f. Jumlah fakir miskin penerima Program Sembako g. Jumlah warga miskin yang memperoleh KUBE h. Jumlah penerima KUBE yang dimonev		Rp. 11.666.087.179	
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin yang terdata	459993 Jiwa	Rp. 2.357.090.750	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	a. Jumlah Rekom JKMM yang dikeluarkan	100%	Rp. 126.460.800	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	a. Jumlah fakir miskin yang masuk program PKH b. Jumlah fakir miskin penerima Program Sembako	a. 39065 Jiwa b. 6000 Jiwa	Rp. 9.182.535.629	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	a. Jumlah keluarga miskin yang dilatih b. Jumlah keluarga miskin yang dimonev d. Jumlah warga miskin yang memperoleh KUBE c. Jumlah Penerima KUBE yang dimonev	a. - Orang b. - Orang c. - KUBE d. - KUBE		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA		a. Prosentase korban bencana alam yang tertangani b. Prosentase korban bencana sosial yang tertangani		Rp 179.032.398	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang tertangani			
	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan permakanan			
	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sandang			

	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi			
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase kelompok rentan yang mendapatkan pelayanan			
	Pelayanan Dukungan Psikososial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan layanan Psikososial			
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	a. Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk b. Jumlah rakor/sosialisasi yang terlaksana		Rp 179.032.398	
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung siaga bencana yang terbentuk	SKB		
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah rakor/sosialisasi yang terlaksana	2 Kali	Rp 179.032.398	
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN		Prosentase sarpras dalam kondisi yang baik		Rp 79.198.850	
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras yang dipelihara			
	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Sarpras yang direhab	-		
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarpras yang dipelihara	1 TMP	Rp 79.198.850	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang diawasi			

BAB IV

INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tercakup dalam misi keempat yaitu *Meningkatnya tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Berbudaya dan Berahklaqul Karimah, Berlandaskan Keimanan Kepada Tuhan YME, serta Dapat Memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban*. Adapun sasaran yang mengarah pada misi tersebut dan terkait dengan tupoksi Dinas Sosial adalah *“Menurunnya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)”*.

Bab ini berupaya untuk memaparkan keterkaitan antara indikator kinerja Dinas Sosial dengan RPJMD Kabupaten Sidoarjo, khususnya yang melekat pada sasaran. Tahapan awal yang dipaparkan adalah identifikasi indikator sasaran yang melekat pada RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial. Adapun penjabaran indikator sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo tersebut sebagai berikut.

Tabel 6.1

Linearitas Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD
Mewujudkan lingkungan sosial masyarakat yang rukun, aman, tertib, nyaman dan berkeadilan	Menurunnya jumlah masyarakat miskin	Persentase penurunan penduduk miskin

Berdasarkan Tujuan RPJMD, Sasaran RPJMD dan Indikator Sasaran RPJMD tersebut, maka dirumuskan Indikator Kinerja Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo dalam lima tahun mendatang guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2016-2021 beserta target capaian setiap tahun sebagaimana tersusun dalam di bawah ini.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Dinas Sosial Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021

Indikator	Formulasi Penghitungan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Prosentase Penurunan PMKS Terhadap Penduduk	$\frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{Jumlah Penduduk Sidoarjo}} \times 100\%$		1,96%	1,93%	1,90%	1,87%	2,23%	1,81%

BAB VII PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016-2021 diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah di rencanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan terkait dengan hasil evaluasi maka tidak menutup kemungkinan Renstra ini dapat ditinjau kembali. Demikian pula untuk dapat terlaksananya Renstra ini, perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari seluruh aparatur baik Struktural maupun Fungsional dan seluruh staf Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo serta dukungan Pemerintah Daerah, baik berupa administratif maupun teknis. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra ini diucapkan terimakasih.



DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017

**PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL
(PMKS)**

